



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1108, 2015

LAN. *Road Map*. Reformasi Birokrasi. Tahun  
2015-2019.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu untuk menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015-2019;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

## Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun 2015-2019.

## Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019

PENDAHULUAN

4

Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) disusun dengan mempertimbangkan bahwa reformasi birokrasi (RB) merupakan proses perubahan yang bersifat jangka panjang, yang perlu dilakukan secara sistematis dan terus menerus pada tataran pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Perpres no 81 tahun 2010 memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dengan menitik beratkan pada delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tataaksana, peraturan perundangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan, pengawasan, dan pola pikir dan budaya kerja. Melalui delapan area perubahan yang diterapkan pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan pada tahun 2025 dapat tercapai visi RB yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia disini adalah “pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut, Grand Design Reformasi Birokrasi menetapkan ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; kualitas pelayanan publik dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran ini merupakan aspek yang penting bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan dimensi yang penting untuk

meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Substansi RB dalam RPJMN kedua tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai prioritas nasional ke-1, yaitu RB dan tata kelola serta dimasukkannya ke dalam agenda pembangunan ke-2 yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.

Terdapat berbagai capaian positif hasil dari program RB yang telah memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah. Capaian ini antara lain perbaikan dalam manajemen SDM aparatur pemerintah, misalnya dengan adanya Rekrutmen CPNS yang lebih transparan dan kompetensi CPNS yang jauh lebih baik serta Rekrutmen terbuka bagi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan untuk mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi pimpinan tinggi. Meskipun masih terdapat banyak kelemahan, sistem administrasi kepegawaian juga dilaksanakan dengan lebih tertib dengan adanya instrumen-instrumen analisis jabatan dan diintegrasikan dengan instrumen penilaian kinerja dan kehadiran pegawai yang lebih baik. Aspek positif lainnya adalah perbaikan kelembagaan dengan adanya sejumlah perubahan organisasi di sejumlah instansi yang lebih efisien sesuai dengan tugas fungsinya. Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran, program reformasi birokrasi mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas yang lebih baik. Terkait dengan pelayanan publik, instansi pemerintah semakin didorong untuk responsive terhadap publik dengan menerapkan sistem pengaduan keluhan pelanggan, standar pelayanan publik, penggunaan e-gov di berbagai bidang layanan transaksional dan proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Perbaikan pelayanan publik juga didukung dengan perbaikan dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan dimensi yang penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Terlebih dalam era demokratisasi dan keterbukaan informasi yang semakin meningkat, publik akan memiliki ekspektasi atau tuntutan kepada pemerintah yang cenderung akan terus meningkat.

Sudah menjadi kewajiban setiap K/L untuk mendukung Reformasi Birokrasi tersebut, tak terkecuali LAN. Pelaksanaan Roadmap RB LAN 2010-2014 yang sudah berakhir, menjadikan keharusan penyusunan Road RB LAN 2015-2019. LAN menyusun roadmap reformasi birokrasi berdasarkan peta kebutuhan perubahan di LAN. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Pada intinya kegiatan-kegiatan dalam roadmap RB Map 2015-2019 ini memuat berbagai upaya untuk melanjutkan dan memperbaiki agenda perubahan LAN.

## AREA : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	E-service Bidang Diklat ***)						<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan E-service Bidang Diklat : sistem informasi diklatpin dan diklat teknis yang terintegrasi, database alumni dan proyek perubahannya</li> <li>Integrasi antara jadwal pelaksanaan diklat dengan pertanggung jawaban keuangan</li> <li>Pengembangan database widyaiswara</li> <li>Monitoring dan evaluasi atas penerapan sistem</li> </ol>	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan
2	ISO Diklat****)						<ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Pelaksanaan</li> <li>Sosialisasi dan Uji Coba</li> <li>Pelaksanaan, Monitoring/Evaluasi, dan Pengembangan</li> </ol>	Tercapainya ISO Diklat
3	E-service STTA						<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan E-service STTA</li> <li>Integrasi antara data mahasiswa di Akademis dan Keuangan</li> <li>Pengembangan Sistem pengelolaan piutang</li> <li>Penyusunan standar mutu pendidikan</li> <li>Monitoring dan evaluasi</li> </ol>	Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan STTA
4	Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja						<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Standar Pelayanan di setiap unit kerja dan menciptakan inovasi pelayanan</li> <li>Pelayanan satu pintu untuk diklat dan pelayan lainnya kepada stakeholder</li> <li>Membuat survey kepuasan pelanggan pada setiap pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan</li> <li>Peningkatan hasil evaluasi RB aspek pelayanan publik</li> </ol>
5	Complain handling						Complain handling di berbagai unit pelayanan : diklat, mahasiswa, WI, JFAK, dan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh aduan tertangani</li> <li>Peningkatan Kualitas Pelayanan</li> </ol>

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

 = Agenda Prioritas

\*\*\*

**AREA : MANAJEMEN PERUBAHAN**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Tim RB sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala LAN Nomor 17/K.1/HKM.03.1/2014</li> <li>2. Menyusun action plan pelaksanaan RB</li> <li>3. Evaluasi Tim Manajemen perubahan dan pelaksanaan RB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>
2	Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring manajemen perubahan dan strategi komunikasi</li> <li>2. Proses <i>Learning organization</i>: meliputi sharing knowledge, benchmarks, FGD, dan Bintek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>
3	Penguatan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB						<p>Review penerapan nilai-nilai perubahan terhadap pola pikir dan budaya kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>
4	Internalisasi Nilai - nilai						Internalisasi Nilai - nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan budaya kerja organisasi</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB</li> </ol>

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

## AREA : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penataan berbagai Per-UUan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh LAN						1. Proleg LAN (Diklat, Kajian, Inovasi, STTA) 2. Review terhadap produk hukum LAN 3. Penataan dokumentasi produk hukum yang telah diterbitkan 4. Sistem Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Peraturan Perundang-undangan

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

 = Agenda Prioritas

## AREA : PENATAAN TATA LAKSANA

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Restrukturisasi penataan tugas unit kerja						1. Evaluasi tupoksi dan kelas jabatan di LAN 2. Penguatan koordinasi antar unit kerja baik di pusat maupun daerah	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan tata laksana
2	Penyusunan Business Process						1. Business Process Reengineering 2. Prioritas program 3. Reviu	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan tata laksana
3	Penyusunan dan penyempurnaan Dokumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan						1. Review SOP dan pemantauan implementasi 2. Merevisi Perkalen Nomor 3 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan LAN	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan tata laksana

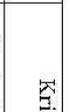
4	Pembangunan/ pengembangan e-office	1. Monitoring/Evaluasi e-office/e-government di LAN 2. Penguatan implementasi e-office 3. Dukungan sarana/komputer Bintek / kursus komputer	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil penilaian PeGI
5	Pengembangan e-government di LAN	Pengembangan e-government di LAN	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil penilaian PeGI

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penguatan organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat						1. Penyusunan rencana aksi 2. Evaluasi dan monitoring 3. Reviu secara berkala	1. Perbaikan proses kerja 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan dan penguatan organisasi

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

## AREA : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penataan Sistem Rekrutmen pegawai						Penyusunan rencana induk kebutuhan pegawai	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
2	Analisis dan Evaluasi Jabatan						Penyempurnaan anjab, ABK, Peta Jabatan, dan Job grading	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
3	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
4	Assesment individu berdasarkan kompetensi						1. Assesment individu berdasarkan kompetensi (lanjutan, fungsional umum) 2. Memetakan hasil assesment	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
5	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu						1. Pengembangan sistem termasuk indikator penilaian 2. Menghubungkan system penilaian dengan SKP	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
6	Pengembangan data base pegawai						1. Pengembangan data base pegawai (sedang dilakukan) 2. Pengembangan SIMKA (sistem Informasi Kepegawaian)	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM
7	Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi						TNA Pengembangan pegawai yang sudah terprogram sesuai kebutuhan kompetensinya.	1. Perbaikan manajemen kepegawaian 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penataan Sistem Manajemen SDM

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

 = Agenda Prioritas

\*\*\*

AREA : PENGUATAN PENGAWASAN								
No	Program RB	Pelaksanaan					Kriteria Keberhasilan	
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						<p>Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan satgas SPIP pada setiap unit kerja</li> <li>2. Review perkakalan nomor 19 tahun 2011 tentang pelaksanaan SPIP di LAN termasuk penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP di LAN</li> <li>3. Penilaian Resiko pada setiap unit kerja.</li> <li>4. Survey penerapan SPIP</li> <li>5. Melakukan piloting penilai resiko terhadap unit kerja tertentu yang dipilih</li> <li>6. Melakukan pemetaan lingkungan pengendalian di LAN</li> <li>7. Mengevaluasi dampak dari penerapan SPIP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK WTP</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>
2	Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat dan kegiatan sejenisnya</li> <li>2. Penguatan kapasitas jejaring kerja</li> <li>3. Peer Review / penelaahan seawat,</li> <li>4. Survey Kepuasan stakeholder</li> <li>5. Audit Kinerja APIP oleh BPK</li> <li>6. Perluasan peran tidak hanya watchdog tetapi juga sebagai konsultan</li> <li>7. Asistensi penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen resiko dan konsultasi pengadaan barang dan jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini BPK WTP</li> <li>2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>
3	LAN yang bersih dan bebas KKN						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Eksternal Korupsi</li> <li>2. Penanganan Gratifikasi</li> <li>3. Pemantauan Penyampaian LHKPN</li> <li>4. Penyelesaian Kerugian Negara</li> <li>5. Pemanfaatan e-procurement</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator capaian aksi PPK</li> <li>2. Perbaikan Skor survey eksternal korupsi</li> <li>3. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan pengawasan</li> </ol>

4	Pengembangan Zona Integritas							6. Aksi PPK 7. Penerapan Whistle Blower Zona Integritas	1. Perbaikan Skor survey eksternal korupsi 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan pengawasan
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---

Keterangan :

 = Tahun pelaksanaan

\*\*\* = Agenda Prioritas

**AREA : Penguatan Akuntabilitas**

No	Program RB	Pelaksanaan					Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Penguatan AKIP						Penguatan kapasitas pada unit kerja Evaluasi AKIP	1. Skor SAKIP 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan akuntabilitas
2	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi						Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi	1. Skor SAKIP 2. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan akuntabilitas
3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)						1. Melakukan reviu IKU setiap tahun dan penetapan melalui Peraturan Kepala LAN 2. Internalisasi dan implementasi IKU 3. Reviu outcome 4. Evaluasi dampak penerapan IKU sebagai acuan bagi pencapaian target kinerja	1. Pebaikan kinerja LAN 2. Skor SAKIP 3. Peningkatan hasil evaluasi RB aspek penguatan akuntabilitas

Keterangan :

= Tahun pelaksanaan

\*\*\*\* = Agenda Prioritas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2015

**KEPALA**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

**AGUS DWIYANTO**